

EVALUASI PROGRAM STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (BABS) DI DESA SUNGAI SANDUNG KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Hadi Saputra¹, M. Husaini², Ahmad Baihaqi³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai
e-mail:h.saputra@gmail.com

ABSTRAK

Evaluasi sering digunakan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna bertanggung jawab kepada konstituennya, sejauh mana tujuan dijangkau serta untuk melihat sejauh mana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Terdapat beberapa fenomena masalah, seperti masih adanya masyarakat yang BAB di sungai, keterbatasan ekonomi, bantuan sarana WC masih belum merata dan rendahnya pola hidup sehat masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan sampel secara *purposive sampling* berjumlah 9 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik meliputi reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa evaluasi program stop buang air besar sembarangan di desa sungai sandung kurang optimal. Program ini optimal dalam tujuan kebijakan, kewajaran layanan, respon masyarakat, hasil berguna/bernilai dan program tepat sasaran. Adapun program ini yang masih belum optimal yaitu hasil kebijakan, biaya, waktu, pencapaian hasil, kepuasan masyarakat terhadap hasil, distribusi program yang merata dan penilaian masyarakat. Di samping itu faktor yang mempengaruhi evaluasi program stop BABS, faktor penghambat yaitu penyalahgunaan wewenang dan keterbatasan dana. Adapun faktor pendukung dalam evaluasi program stop BABS yaitu adanya bantuan akses sanitasi, kemauan masyarakat dalam mengubah kebiasaan yang kurang baik tersebut dan adanya pendataan.

Kata kunci : Evaluasi, Program, Stop BABS

ABSTRACT

Evaluation is often used to assess the effectiveness of public policies in order to be accountable to their constituents, the extent to which goals are achieved and to see the extent of the gap between expectations and reality. There are several problematic phenomena, such as the existence of people who defecate in rivers, economic limitations, assistance for toilet facilities is still not evenly distributed and the low healthy lifestyle of the community. This study uses a qualitative approach with a descriptive-qualitative type. The data collection techniques used are interviews, observations and documentation. Data sources were taken through purposive sampling of 9 people. After the data was collected, it was analyzed using techniques including data reduction, data presentation and verification or drawing conclusions. The results of the study indicate that the evaluation of the stop defecating in the open in Sungai Sandung village is less than optimal. This program is optimal in terms of policy objectives, fairness of service, community response, useful/valuable results and targeted programs. The programs that are still not optimal are policy results, costs, time, achievement of results, community satisfaction with results, even distribution of programs and community assessments. In addition, factors that influence the evaluation of the stop defecation program, inhibiting factors are abuse of authority and limited funds. The supporting factors in the evaluation of the stop BABS program are the provision of assistance for sanitation access, the community's willingness to change these bad habits and data collection.

Keywords: Evaluation, Program, Stop BABS

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini masih banyak menghadapi masalah kesehatan penduduk yang belum teratasi oleh Pemerintah Indonesia. Mulai dari rendahnya anggaran pemerintah untuk kesehatan hingga rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Indonesia akan kebersihan dan kesehatan diduga menjadi pemicu utama. Ada berbagai permasalahan kesehatan yang tampak dominan di Indonesia salah satunya keadaan kesehatan lingkungan di Indonesia masih merupakan hal yang perlu mendapat perhatian, karena menyebabkan status kesehatan masyarakat berubah seperti: penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, pembuangan air limbah penggunaan pestisida, Peledakan penduduk, masalah gizi, masalah pemukiman, masalah kebersihan lingkungan, pelayanan kesehatan, ketersediaan obat, populasi udara, abrasi pantai, penggundulan hutan dan banyak lagi permasalahan yang masalah lainnya.

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan akses sanitasi dasar yang berkesinambungan dalam pencapaian Indonesia Universal Akses. Untuk mewujudkan komitmen sebagaimana dimaksud, maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan suatu kebijakan berbasis masyarakat yang berkualitas, sistematis dan berkelanjutan dalam rangka merubah perilaku masyarakat dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi yang layak. Sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

Kabupaten Hulu Sungai Utara secara geografis dengan kondisi wilayahnya yang banyak digenangi oleh rawa di mana hampir semua wilayahnya tergenang sepanjang tahun dan sisanya tergenang secara periodik memerlukan pengaturan kedalaman air untuk dapat di dimanfaatkan, hal ini akan berdampak juga pada perencanaan pengembangan sektor sanitasi (air limbah, persampahan, drainase).

Kecamatan sungai pandan memiliki 33 desa dan pada 2024 hampir semua desa mendapatkan program Stop BABS, salah satunya desa sungai sandung yang mendapati program Stop BABS pada tahun 2018-2019, saya tertarik meneliti judul ini karena dari observasi awal yang dapat di lihat dari tahun ke tahun tepatnya pada awal mula adanya program sampai dengan 2024 program berjalan saya liat tidak dapat menyelesaikan masalah masyarakat membuang air besar di sungai disebabkan untuk menyelesaikan masalah ini tidak hanya bergantung pada pemerintah atau masyarakatnya sendiri akan tetapi perlu adanya kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan diketahui bahwa ada masalah terhadap Evaluasi Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Desa Sungai Sandung Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara antara lain:

1. Masih adanya masyarakat yang BAB di sungai, ada juga yang sudah menggunakan WC akan tetapi tidak memiliki septik tank sehingga pipa pembuangan mengarah ke sungai yang mana sungai masih menjadi sumber air bersih bagi beberapa masyarakat.
2. Keterbatasan ekonomi yang membuat masyarakat masih menggunakan jamban untuk buang air besar.
3. Bantuan sarana WC masih belum merata sehingga masih ada masyarakat yang BAB di sungai.
4. Rendahnya pola hidup sehat masyarakat.

Evaluasi

Evaluasi sering digunakan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna bertanggung jawab kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dijangkau serta untuk melihat sejauh mana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan.

Menurut Nugroho (2014:706), menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan dari kinerja implementasi kebijakan publik. Evaluasi dilaksanakan setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

Dunn dalam Nugroho (2014:728), menjelaskan terkait evaluasi sebagai berikut: “Evaluasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah terselesaikan, tetapi juga menyumbang klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah”.

Menurut Chazali (2016:281), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.

Lester dan Stewart Dalam Chazali, (2016:282), menjelaskan evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda yaitu sebagai berikut:

- a. Tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya, sedangkan.
- b. Tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tugas pertama merujuk pada usaha untuk melihat apakah program kebijakan publik mencapai tujuan atau dampak yang di inginkan atau tidak sedangkan tugas kedua dalam program kebijakan pada dasarnya berkaitan erat dengan tugas pertama.

Scriven dalam Wirawan, (2016) membedakan model evaluasi menjadi dua, yaitu:

- a. Evaluasi Formatif (*Formative evaluation*) yaitu evaluasi yang didesain dan dipakai untuk memperbaiki suatu objek, terutama ketika objek tersebut sedang dikembangkan. Evaluasi formatif dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :
 - 1) Untuk mengukur hasil pelaksanaan secara periodik
 - 2) Untuk mengukur apakah klien/partisipatisan bergerak ke arah tujuan yang direncanakan
 - 3) Untuk mengukur sumber-sumber telah dipergunakan sesuai rencana
- b. Evaluasi Sumatif yaitu evaluasi yang dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program. Evaluasi ini mengukur kinerja akhir objek evaluasi. Evaluasi sumatif berupaya mengukur indikator-indikator sebagai berikut:
 - 1) Untuk mengukur sukses keseluruhan pelaksanaan program
 - 2) Untuk mengukur tujuan umum dan tujuan khusus program telah tercapai
 - 3) Untuk mengukur manfaat program

Dari pendapat para ahli mengenai evaluasi kebijakan publik, dapat dinyatakan bahwa evaluasi merupakan suatu proses yang menentukan sampai sejauh mana tujuan kebijakan dapat dicapai. Evaluasi juga untuk menilai, mengukur, serta membandingkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan sebuah kebijakan atau program yang hasilnya sudah sesuai atau belum dengan apa yang sudah direncanakan secara efektif dan efisien. Evaluasi juga dapat memperoleh informasi

mengenai nilai atau manfaat hasil dari kebijakan tersebut, serta dapat dilakukan perbaikan apabila ada penyimpangan sehingga akan membuat kebijakan tersebut nantinya menjadi lebih baik.

Evaluasi kebijakan publik merupakan sebuah proses sistematis yang bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan, efektivitas, efisiensi, dan dampak kebijakan publik yang telah diimplementasikan. Tujuannya adalah untuk memberikan masukan atau arahan untuk program selanjutnya atau masukan bagi kebijakan yang sudah ada. Proses evaluasi ini melibatkan penilaian terhadap kebijakan atau program dengan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan serta mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kebijakan tersebut gagal atau berhasil.

Dunn dalam Rahayu (2016:203) membagi kriteria evaluasi menjadi 6 (enam) kriteria di antaranya sebagai berikut:

- 1) Efektivitas, merupakan suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.
- 2) Efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.
- 3) Kecukupan, merupakan sejauh mana tingkat efektivitas dalam memecahkan masalah untuk memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan masalah.
- 4) Perataan yang mempertanyakan apakah distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik sudah merata sesuai dengan asas keadilan.
- 5) Responsivitas, mencakup respon dari hasil kebijakan tersebut apakah sudah memuaskan kebutuhan atau nilai terhadap kelompok-kelompok tertentu.
- 6) Ketepatan, merupakan sebuah ukuran apakah sebuah program atau kebijakan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan, dan hasil yang dicapai benar-benar berguna atau bernilai sesuai yang direncanakan”

Menurut Patton dan Sawicki dalam Dyah mutiarin dan Arif Zaenuddin (2014:7), evaluasi dibedakan menjadi :

1. Pra Evaluasi, yakni evaluasi yang dilakukan pada saat program belum berjalan/beroperasi pada tahap perencanaan.
2. Evaluasi pada saat program tengah berjalan, yang dikenal dengan *on going evaluation* atau *in operation*, disebut juga dengan *mid term evaluation*.
3. Evaluasi setelah program selesai atau setelah program berakhir. Evaluasi ini bisa disebut *ex post evaluation*.

Wirawan (2016:24-26) membedakan jenis-jenis evaluasi berdasarkan objeknya menjadi beberapa jenis, yaitu :

1. Evaluasi kebijakan

“Kebijakan adalah rencana umum dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas. Kebijakan akan berlangsung terus sampai dicabut atau diganti dengan kebijakan baru; umumnya karena kebijakan yang lama tidak efektif dan efisien atau karena terjadi pergantian pejabat dan pejabat baru mempunyai kebijakan yang berbeda dengan kebijakan pejabat sebelumnya”. Istilah lainnya ialah analisis kebijakan, analisis kebijakan adalah menentukan atau memilih satu alternatif kebijakan yang terbaik dari sejumlah alternatif kebijakan yang ada. Sedangkan evaluasi kebijakan adalah menilai kebijakan yang sedang atau telah dilaksanakan.

2. Evaluasi Program

Program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas. Evaluasi program adalah “metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai program”. Evaluasi program dapat dikelompokkan menjadi evaluasi proses (*process evaluation*), evaluasi manfaat (*outcome evaluation*) dan evaluasi akibat (*impact evaluation*).

3. Evaluasi Proyek

Evaluasi proyek sebagai “kegiatan aktivitas yang dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu untuk mendukung pelaksanaan program”.

4. Evaluasi material

Evaluasi material, untuk melaksanakan kebijakan, program atau proyek diperlukan sejumlah material atau produk-produk tertentu. Misalnya, untuk melaksanakan program *Bus Way* diperlukan bus dengan kualitas tertentu: nyaman, memuat banyak penumpang, tahan lama, hemat bahan bakar, dan biaya pemeliharannya yang murah. Oleh karena itu, bus yang dipergunakan *Bus Way* dievaluasi dengan kriteria tersebut.

5. Evaluasi Sumber Daya Manusia (SDM)

Evaluasi sumber daya manusia atau yang dikenal dengan evaluasi kinerja dilakukan untuk mengetahui pengembangan sumber daya manusia atau human resources development. Evaluasi sumber daya manusia dapat dilaksanakan disebuah lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, bisnis dan lembaga swadaya masyarakat”.

Kebijakan Publik

Kebijakan Publik menurut Thomas Dye dalam Subarsono (2021:2) adalah : Apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose ssto do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah ketika menghadapi suatu masalah publik. Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk tidak membuat program baru atau tetap pada status quo.

Menurut James E. Anderson dalam Subarsono (2021:2) “mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun didasari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintahan”.

Salah satu definisi mengenai kebijakan publik menurut Robert Eyestone dalam Nuryanti Mustari (2015:4):“Etestone mengatakan bahwa secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Konsep ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud kebijakan publik dapat mencakup banyak hal”.

Salah satu definisi mengenai kebijakan publik menurut Robert Eyestone dalam Nuryanti Mustari (2015:4):“ bahwa secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Konsep ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.”

Kemudian, Charles Lindblom dalam Nuryanti Mustari (2015:6) menuturkan Pembuatan kebijakan publik (*public policy-making*) pada hakikatnya merupakan proses politik yang amat

kompleks dan analitis di mana tidak mengenal saat dimulai dan di akhirnya, dan batas-batas dari proses itu sesungguhnya yang tidak pasti. Serangkaian kekuatan- kekuatan yang agak kompleks itulah yang kita sebut sebagai pembuatan kebijakan publik yang kemudian membuahkan hasil yang disebut Kebijakan.”

Pengertian kebijakan publik menurut Carl Freadrich dalam Joko Pranomo (2020:30) yang mengatakan bahwa:

“Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan (kesempatan-kesempatan) di mana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.”

Pengertian BABS

Perilaku buang air besar sembarangan (BABS/*Open defecation*) termasuk salah satu contoh perilaku yang tidak sehat karena perbuatan. tersebut mencemari lingkungan. BABS/*Open defecation* adalah suatu tindakan membuang kotoran atau tinja di ladang, hutan, semak – semak, sungai, pantai atau area terbuka lainnya dan dibiarkan menyebar mengontaminasi lingkungan, tanah, udara dan air.

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan (STOP BABS) yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, maka diperlukan komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan akses sanitasi dasar yang berkesinambungan dalam pencapaian Indonesia Universal Akses. untuk mewujudkan komitmen sebagaimana dimaksud , maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan suatu kebijakan berbasis masyarakat yang berkualitas, sistematis dan berkelanjutan dalam rangka mengubah perilaku masyarakat dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi yang layak. Sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

METODE

Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Sandung Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pendekatan ini menggunakan pendekatan deskriptif, dan penelitian ini merupakan salah satu jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.

Penelitian kualitatif adalah deskriptif. Data yang dikumpulkan lebih mengambil kata-kata atau gambar daripada angka-angka. Hasil penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan dari data untuk mengilustrasikan dan menyediakan bukti presentasi. Data tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, *videotape*, dokumen pribadi, memo dan rekaman- rekaman resmi lainnya. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan sampel secara *purposive sampling* berjumlah 9 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik meliputi reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Evaluasi Program Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Di Desa Sungai Sandung Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (STOP BABS) yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan akses sanitasi dasar yang berkesinambungan dalam pencapaian Indonesia Universal Akses untuk mewujudkan komitmen sebagaimana dimaksud, maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan suatu kebijakan berbasis masyarakat yang berkualitas, sistematis dan berkelanjutan dalam rangka merubah perilaku masyarakat dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi yang layak. Sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS).

1. Efektivitas

Tujuan dari Gerakan stop buang air besar sembarangan ada pada PERDA Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016, Bab II yang berisi Maksud dan Tujuan Pasal 2, tujuan kebijakan adalah untuk mewujudkan perubahan perilaku masyarakat yang higiene dan saniter dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi layak dengan pendekatan STBM yang melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dan menurunkan angka kesakitan pada penyakit berbasis lingkungan terutama diare, penyakit kulit, cacing, dan lain-lain yang berdampak pada penurunan angka kematian. Dari tujuan tersebut sudah bisa kita katakan optimal di Desa Sungai Sandung di bandingkan sebelum adanya bantuan.

Hasil dari program stop BABS belum optimal dilihat dari 7 RT di desa Sungai Sandung hanya 3 RT yang sudah ODF(*open defecation free*) 4 RT sisanya masih BAB ke sungai dengan jumlah KK yang masih BAB ke sungai 59 KK dikarenakan program sudah mengalami stagnan dari 2019 dan masih banyaknya warga yang kurang mampu dalam membuat akses sanitasi sendiri.

2. Efisiensi

Biaay atau dana untuk program stop BABS belum optimal, adanya masalah pada program tersebut sehingga dana tidak di keluarkan lagi dan program mengalami stagnan atau menjalankan program menggunakan dana Desa Sungai Sandung tahun 2018-2019 dan mengalami stagnan juga karena program tidak berlanjut dengan kendala keterbatasan dana Desa dan harus menjalankan program yang lainnya.

Waktu yang ingin di capai belum optimal, pada awalnya target dari pencapaian program adalah tahun 2019 akan tetapi di 2024 belum juga berhasil maka target di rumah menjadi 2024 dan di harapkan bisa mencapai 100%.

3. Kecukupan

Pencapaian hasil belum optimal, program ini mengalami stagnan di tahun 2020 hingga sekarang dikarenakan faktor ekonomi dan dana Desa yang terbatas sehingga untuk program stop BABS di Desa Sungai Sandung itu belum mencapai seluruh masyarakat atau belum mencapai seperti yang terdapat dalam PERDA No.4 tahun 2016 pasal 6 yang menyatakan bahwa program stop BABS dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi.

Kepuasan masyarakat terhadap hasil dari program stop BABS di Desa Sungai Sandung adanya 2 penilaian atau pandangan yaitu ada yang puas karena menerima bantuan dan tidak puas atau kecemburuan sosial pada orang yang tidak mendapatkan bantuan tersebut yang mana

yang mendapatkan hanya 33KK dan yang masih BAB ke sungai adalah 59KK. Sehingga kepuasan masyarakat terhadap hasil belum optimal. Kepuasan masyarakat terhadap hasil di pengaruhi oleh merata atau tidaknya suatu program yang di jalankan oleh pemerintah.

4. Perataan

Distribusi program yang merata belum optimal. Program yang di lakukan pemerintah yang sesuai dengan PERDA No.4 Tahun 2016 dan mulai di jalankan di Desa Sungai Sandung pada tahun 2018-2019 tetapi mengalami stagnan hingga sekarang yang menjadi alasan yang sangat logis kenapa program tersebut tidak merata di Desa Sungai Sandung, faktor ekonomi masyarakat yang rendah, dan rendahnya pemahaman bagi yang sudah mampu tapi mengharap bantuan yang ada pada pemerintah yang itu pun belum diketahui kapan program ini dilanjut sedangkan untuk sosialisasi sendiri sudah di katakan bagus. Tidak meratanya suatu program itu akan menimbulkan kecemburuan sosial antara yang dapat bantuan dan tidak dapat bantuan, perataan juga dapat menjadi faktor kepuasan masyarakat.

Program stop BABS di Desa Sungai Sandung cukup baik, seperti sosialisasi ke masyarakat sudah ada, penyuluhan peraturan stop BABS sudah merata ke semua Desa, hanya saja untuk bantuan sarana WC baru hampir mendekati 50%nya walaupun dapat kita ketahui bahwa program ini mungkin tidak mencakup seluruh masyarakat yang menggunakan jamban akan tetapi masih banyaknya masyarakat yang ekonominya kurang juga ingin merasakan hasil dari kebijakan agar tidak ada kecemburuan sosial.

5. Responsivitas

Respon masyarakat terhadap program stop BABS di Desa Sungai Sandung ini dengan baik karena sudah berdampak langsung dengan perubahan perilaku masyarakat. Ini juga sebagai bukti bahwa sosialisasi tentang bahaya dan manfaatnya di rasakan oleh masyarakat, terlebih program ini gratis dari pemerintah hanya saja di Desa Sungai Sandung masih belum merata.

Penilaian masyarakat terhadap hasil belum optimal, Penilaian masyarakat itu berbeda-beda di sebabkan oleh faktor efektivitas, efisiensi dan kecukupan yang masih cukup jauh dari program yang di targetkan pemerintah pada PERDA No.4 tahun 2016 pasal 6 yakni mencakup seluruh daerah baik itu tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang mana di Desa Sungai Sandung sendiri masih ada 59KK yang belum dapat merasakan manfaat dari BABS ke sungai. Sehingga untuk menilai respon dari masyarakat pun agak susah karena adanya sebuah perbedaan yang menimbulkan kecemburuan sosial.

6. Ketepatan

Hasil berguna/bernilai sudah optimal. Hal ini dapat dilihat dari semua penerima bantuan, semuanya sudah mengubah kebiasaan kurang baik tersebut dan merobohkan jamban yang berarti bantuan pemerintah sangat berguna.

Program tepat sasaran sudah optimal. Hal ini di karenakan adanya pendataan sebelum pemberian bantuan sarana WC untuk melihat mana yang layak dan tidak layak menerima bantuan.

Faktor Pendorong stop BABS

- 1) Adanya Bantuan Akses Sanitasi dan Kemauan Masyarakat Dalam Mengubah Kebiasaan Yang Kurang Baik.

Bahwa faktor pendukung stop Buang Air Besar Sembarangan ada 2 faktor yaitu pemberian bantuan dan pemberian pemahaman adalah 2 faktor pendorong yang saling terikat dan tidak bisa di pisah, karena tanpa adanya bantuan sarana sanitasi maka pemerintah tidak

dapat melakukan penegasan implementasi kepada masyarakat yang kurang mampu di sebabkan adanya aturan tidak ada solusi, begitu juga sebaliknya bantuan ada tetapi masyarakat tidak memiliki pemahaman untuk mengubah kebiasaan yang kurang baik tersebut. Oleh sebab itu di perlukan ke 2 faktor tersebut agar mencapai tujuan yang di harapkan oleh pemerintah yaitu 100% akses sanitasi, 0% pemukiman kumuh dan 100% akses air minum bersih.

2) Adanya pendataan

Adanya pengevaluasian dapat menjadi faktor pendorong program stop buang air besar sembarangan karena pemerintah dapat mengetahui dengan spesifik kelayakan penerima bantuan.

Faktor Penghambat stop BABS

1) Penyalahgunaan wewenang dan Keterbatasan dana

Faktor yang menghambat program stop buang air besar di yaitu adanya penyalahgunaan wewenang pada tahun 2019 yang menyebabkan pada hilangnya anggaran yang sudah ada sehingga mengharuskan menggunakan dana Desa yang mana dana Desa juga terbatas.

SIMPULAN

Evaluasi Program Stop Buang Air Besar Sembarangan Di Desa Sungai Sandung Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara berjalan kurang optimal. Di lihat dari tujuan kebijakan sudah optimal, hasil kebijakan belum optimal dapat di lihat dari adanya masyarakat yang masih BABS bahkan 59KK yang masih BABS ke sungai, Biaya masih kurang jika ingin mencapai semua masyarakat yang kurang mampu, waktu pencapaian belum optimal dikarenakan pada awalnya waktu yang ingin di capai adalah 2019 sudah 100%, pencapaian hasil belum maksimal di tahun 2023, kepuasan masyarakat belum optimal, distribusi program yang merata belum optimal, kewajaran layanan sudah optimal, respon masyarakat sudah optimal, penilaian masyarakat cukup baik, hasil sangat berguna/bernilai jadi sangat saya harapkan program mencapai target 100% pada tahun ini, program sudah tepat sasaran sudah optimal tetapi masih kurang. Faktor yang mempengaruhi program stop BABS di Desa Sungai Sandung Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu: Pertama, penyalahgunaan wewenang yang berakibat program mengalami stagnan. Kedua, kurangnya anggaran, bantuan WC gratis atau sarana sanitasi dari pemerintah sebagian sudah diberikan tetapi memang belum merata karena terbatasnya anggaran. Guna meningkatkan hasil program stop BABS di Desa Sungai Sandung Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten HSU, maka di sarankan kepada Dinas kesehatan untuk memberikan sosialisasi dan dapat mengusulkan untuk mendapat bantuan agar tercapainya hasil 100%, saran kepada Kepala Desa Sungai Sandung agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dan saran kepada masyarakat agar bisa mengubah kebiasaan yang kurang baik tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Anonim 2015 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan

- Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.
- Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.
- Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.
- Ahdiat, R. and Afrilla, P.N.A.N. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KABUT ASAP DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2518–2529.
- Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.
- Anjasmari, N.M.M. and Hasna, N.O. (2023) 'EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10), pp. 4457–4465.
- Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administratus*, 8(2), pp. 56–68.
- Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) 'IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.
- Riadi, S., Ahdiat, R. and Hidayatullah, G.M. (2023) 'PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STUDI KASUS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN PADA PASAR INDUK AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al'iidara Balad*, 5(1), pp. 25–30.
- Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.
- Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.
- Urahmah, N. and Isma, I. (2023) 'IMPLEMENTASI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1) BATAS USIA PERKAWINAN: STUDI KASUS DI DESA PASAR SENIN DAN DESA RANTAWAN, KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), pp. 5494–5500.
- Urahmah, N., Ulfah, R. and Riyantor, R. (2022) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR (BABS) DI KECAMATAN BANJANG (STUDI KASUS DESA KALINTAMUI, KALUDAN BESAR, PALANJUNGAN SARI)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), pp. 849–855.

Situmorang, Chazali H. 2016. *Kebijakan Publik. (Teori Analisis, Implementasi, dan Evaluasi kebijakan)*. Depok : CV Khalifah Mediatama.

Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Subarsono. 2021. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mustari, Nurhayati. 2015. *Pemahaman Formulasi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera.

Wirawan, 2016 *Evaluasi Teori, Model, Metodologi, Standar, Aplikasi, Dan Profesi*. PT Persada.

Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif. Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksana.

Kusuma Dewi, Rahayu. 2016. *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung. Pustaka Setia

Nugroho, Rian. 2014. *Public Policy (Edisi keempat revisi 2012)* Jakarta PT Gramedia